ANALISIS MOTIF NONSTRATEGIS BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG DALAM YAMUNA ACTION PLAN

Ammar Bianda Katon
Jurusan Hubungan Internasional
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
ammar20001@mail.unpad.ac.id

Anggia Utami Dewi
Departemen Hubungan Internasional
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
anggia.utami@unpad.ac.id

Nur Fatah
Jurusan Ilmu Hukum
Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
nurfatahsh@gmail.com

Submitted: May 11th 2024 | Accepted: July 23rd 2024

ABSTRAK

Pengolahan limbah masyarakat maupun industri yang buruk dan kendala administrasi yang dialami Pemerintah India telah memperburuk masalah sanitasi di Sungai Yamuna. Sejak 1992, Jepang memberikan *foreign aid* kepada India melalui program Yamuna Action Plan (YAP) untuk membantu mereka dalam menangani masalah sanitasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa Jepang memberikan *foreign aid* dalam YAP selain dari alasan strategisnya melalui konsep *foreign aid* sebagai kebijakan luar negeri. Dengan menggunakan motif *foreign aid* menurut Riddell, penulis meneliti YAP Jepang kepada India berdasarkan hubungan secara historis dan bantuan inisiatif untuk mencapai pembangunan negara penerima. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif yang menggunakan data kepustakaan sekunder dalam menganalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa YAP diluncurkan, di antaranya, karena 1) sejarah masuknya Buddhisme ke Jepang, perdagangan India-Jepang, serta hubungan *perceived* India-Jepang; dan 2) niat Jepang membantu India mencapai tujuan pembangunannya yang didasari oleh nilai budaya/norma sanitasi dengan kapasitas pengaturan sanitasi Jepang. Corak kedua motif ini ditemukan mencolok dalam narasi-narasi hubungan bilateral Jepang-India dalam proyek YAP.

Kata Kunci: Foreign Aid; India; Jepang; Kebijakan Luar Negeri; YAP

ABSTRACT

Poor public and industrial sewage treatment, as well as the administrative constraints faced by the Government of India, have exacerbated sanitation problems in the Yamuna River. Since 1992, Japan has been providing foreign aid to India through the Yamuna Action Plan (YAP) program to support them in managing this sanitation problem. This article aims to answer why Japan has provided foreign aid to YAP apart from its strategic motives through the concept of foreign aid as foreign policy. Using foreign aid motives according to Riddel, the writer examined YAP based on the historical relations and initiatives that help the achievement of the recipient country's development. This paper uses qualitative research with descriptive purposes extracted from secondary library data in the analysis. The result shows that YAP was launched because of, among other motives/agendas, 1) the historical record of Buddhism in Japan, India-Japan trade, and India-Japan political relations; and 2) Japan's intention to help India achieve its development goals based on Japan's cultural values/sanitation norms with its capacity of managing sanitation. These two motifs are found prominently in the narratives of Japan-India bilateral relations for the YAP project.

Keywords*: Foreign Aid; Foreign Policy; India; Japan; YAP*

PENDAHULUAN

Sungai Yamuna adalah sungai sepanjang 1.376 km yang melewati tujuh negara bagian di India Utara, termasuk area industri perkotaan Delhi. Lima negara bagian terbesar yang dilaluinya memiliki total 32,86% dari populasi India dengan rata-rata pertumbuhan masyarakat 13,94% dari tahun 2011-2019 dan tiga negara bagian diantaranya masuk dalam daftar sepuluh negara bagian dengan kepadatan penduduk tertinggi di India (Statistics Times, 2020; MapsofIndia, 2021). Sungai Ganga yang merupakan induk sungai yang paling tercemar di India menjadikan Yamuna sebagai anak sungai dengan sanitasi terburuk, bahkan dapat dijadikan refleksi bahwa India yang memiliki permasalahan pencemaran tertinggi di dunia (World Population Review, 2023a; Upadhyay et al., 2011; Misra, 2010). Sungai Yamuna yang melalui Delhi dan Haryana sudah tercemar oleh limbah dari tiga ratus unit industri yang mayoritasnya tanpa pengolahan (Shukla, 2020). Selain itu, lebih dari 50% populasi India tidak memiliki akses ke air bersih untuk diminum sebagaimana Sungai Yamuna menjadi sumber air bagi masyarakat Delhi (UNICEF, n.d.; WaterAid, 2018; Delhi Metro, 2020, pp. 1-2). Terlebih, pasokan air sudah sering menjadi permasalahan umum di India dengan tingginya angka kemiskinan; buruknya tradisi/kebiasaan pencemaran oleh penduduk India; kurangnya infrastruktur; dan tingginya tarif air bersih (JICA, 2019a; TCD, 2020, pp. 50-52).

Air sebagai kebutuhan dasar konsumsi, kebersihan, dan kesehatan manusia menuntut pengelolaan sanitasi yang baik untuk mencegah penyakit dan menghasilkan sumber air yang baik pula. Pengelolaan sanitasi menjadi indikator tingkat pembangunan setempat dan seringkali dijadikan cerminan kredibilitas tata kelola pemerintah. Masalah sanitasi di Sungai Yamuna yang sampai saat ini tidak menunjukkan penurunan, diakibatkan oleh dua hal (Agarwal, 2021a). Pertama, sumber pencemaran/polusi di Sungai Yamuna, yaitu limbah industri dan masyarakat yang langsung dibuang ke sungai tanpa diolah; pengolahan air oleh lembaga/perusahaan

ilegal; kualitas air limbah olahan yang buruk dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); serta area berbahan nontanah (Misra, 2015; Sharma, Singal, & Pata, 2009; Aijaz, 2020; Halder, 2019; Misra, 2010; Kumar, et al., 2018; Yadav & Khandegar, 2019; Indiatvnews.com, 2022; Sanyal, 2015). Kedua, pemerintah India sering mengalami masalah tersendiri seperti penundaan pelaksanaan kebijakan atau pembangunan infrastruktur; prioritas politik; akses perizinan; korupsi; penyalahgunaan anggaran; repot/banyaknya lembaga pengatur; defisit anggaran; kurangnya jumlah bersama buruknya kualitas penyediaan maupun pengawasan infrastruktur dan sistem pengolahan limbah; buruknya kinerja manajemen kebersihan; serta sikap saling menyalahkan antarlembaga (Jain, 2016a; Aijaz, 2020; The Economic Times, 2016; Lachandani & Nandi, 2017; Agarwal, 2021b; Lavania, 2018; Indiatvnews.com, 2022).

Jepang memberikan bantuan luar negeri (*foreign aid*) kepada India untuk menangani masalah sanitasi di Sungai Yamuna (Donor Tracker, 2022). Sejak 1992, *foreign aid* berupa Official Development Assistance (selanjutnya disingkat menjadi: ODA) diberikan dalam Yamuna Action Plan (selanjutnya disingkat menjadi: YAP) yang merupakan salah satu program *foreign aid* bilateral Jepang kepada India. Melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), Delhi Jal Board (DJB) India menerima ODA YAP berupa uang pinjaman (JICA, 2021a). Tujuan-tujuan YAP yang dipublikasikan dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, untuk mengurangi polusi/pencemaran dan meningkatkan kualitas air Sungai Yamuna dengan mengembangkan atau menambah kapasitas sistem pengolahan limbah melalui kontruksi, pemeliharaan, dan renovasi IPAL; saluran pembuangan; Intersepsi dan Drainase (I&D); dan aspek-aspek nonlimbah seperti pembangunan kamar mandi umum, aturan mandi di sungai, peningkatan krematorium, penghijauan dan penanaman teratur, serta kampanye kesadaran masyarakat sehingga mampu meningkatkan kondisi sanitasi penduduk (JICA, 2021a). Kapasitas IPAL diharapkan mampu mengolah limbah yang dihasilkan oleh sektitar 4 juta orang Delhi (JICA, 2019b). Kedua, YAP juga bertujuan untuk meningkatkan estetika area dan memberikan kenyamanan yang lebih baik kepada penduduk lokal dan wisatawan asing (JICA, 2019c). Ketiga, untuk meningkatkan layanan penyediaan air yang adil dan berkelanjutan melalui kontruksi infrastruktur pengolahan dan distribusi air (JICA, 2015a).

Di balik tujuan-tujuan YAP yang dipaparkan di berbagai media Jepang, YAP sebagai *foreign aid* mempunyai motif-motif implisit yang menjadi objek analisis penelitian ini. Sebagai negara yang mempunyai sejarah hubungan baik dengan Jepang, India menjadi penerima *foreign aid* Jepang pertama dan terbesar (OECD, 2020; MOFA Japan, 2021). Jepang memberikan *foreign aid* terutama kepada negara-negara yang mempunyai tingkat sanitasi yang rendah, dengan mempubikasikan bahwa *foreign aid* ini dalam rangka meningkatkan pembangunan negara penerima. Selain kepentingan-kepentingan strategis dan/atau ekonomi nasionalnya, norma maupun kepedulian Jepang juga turut mendasari alasan diberikannya *foreign aid* sehingga mencerminkan motif *foreign aid* yang dikemukakan oleh Roger C. Riddell (2007, pp. 91-92).

Di sisi lain, kajian-kajian *foreign aid* Jepang telah dibahas secara umum oleh beberapa penelitian terdahulu (Nurhidayatika, 2020; Pugh, 2019; Leheny & Warren,

2010). Penelusuran literatur melalui Publish or Perish yang bersumber Crossreff dengan acuan kata kunci "Foreign Aid; Foreign Aid Motive; India; Japan; Yamuna Action Plan", menunjukkan 548 artikel sejak tahun 1952 sampai 2022 (lihat **Gambar I.1**). Gambar tersebut menunjukkan bahwa banyak penelitian terdahulu mengenai *foreign aid* Jepang yang memiliki kaitan dengan konsep/istilah *foreign policy*, India, dan pembangunan. Sedangkan penelitian tentang YAP sebagai studi kasus yang dianalisis melalui kajian Hubungan Internasional belum pernah dilakukan (Sharma et al., 2009; Patel et al., 2020; Shukla M. K., 2021).

Gambar 1. Visualisasi Hubungan Literatur Terdahulu

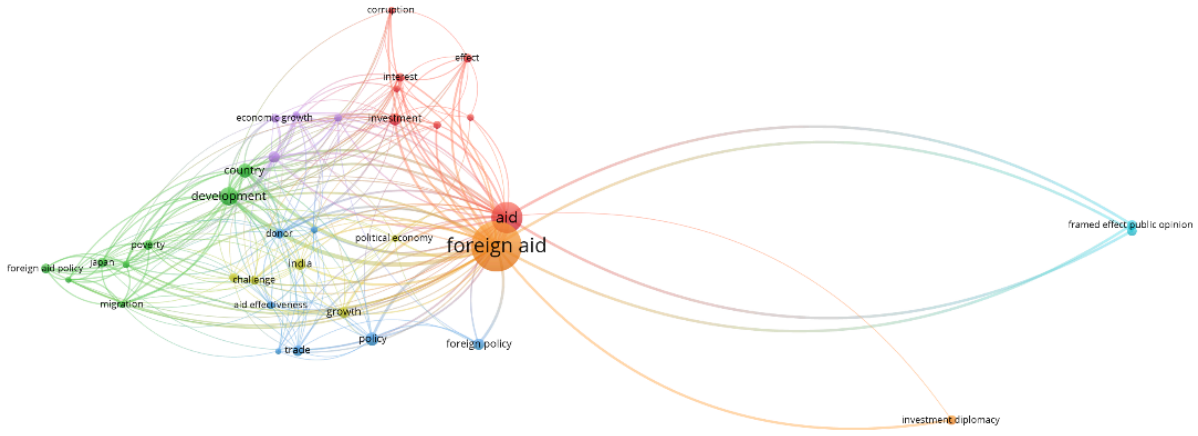

Sumber: Analisis Penulis

Atas dasar latar belakang dan konteks inilah, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian tentang *foreign aid* dengan menganalisis motif nonstrategis *foreign aid* melalui konsep yang diusung Riddell (2007). Tulisan ini mengidentifikasi motif *foreign aid* Jepang dalam YAP sebagai program bilateral yang cukup mencakup dasar-dasar nonstrategis (nonpolitik dan nonekonomi), khususnya historis dan pembangunan. Kedua motif ini ditemukan sangat mencolok dalam narasi-narasi bilateral Jepang-India dalam proyek YAP. Penelitian ini ditujukkan untuk menjawab rumusan masalah "mengapa Jepang memberikan *foreign aid* dalam YAP berdasarkan motif nonstrategis?". Istilah "nonstrategis" merujuk pada cara/langkah negara/pelaku untuk tujuan selain memenuhi agenda politik dan ekonomi sebagai kepentingan nasionalnya sendiri, selaras dengan arti tatanan dunia dan ekonomi yang disebutkan oleh Donald E. Nuechterlein (1976) sebagai kepentingan nasional. Pada akhirnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai penguat argumen bahwa bantuan internasional dilakukan secara altruistik ataupun egaliter, bukan lebih dari agenda politik-ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan deskriptif untuk mengulik motif nonstrategis *foreign aid* Jepang dalam YAP melalui konsep motif foreign aid yang dikemukakan oleh Riddell (2007). Data sekunder dipergunakan melalui teknik pengumpulan data studi literatur yang diakses melalui *internet-based searching*, yakni buku-buku akademik; artikel jurnal ilmiah; artikel berita; serta

dokumen dan laporan resmi. Pengujian kesesuaian data-data tersebut dilakukan dengan diskusi bersama kolega. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap: reduksi data; penyajian data; lalu penarikan kesimpulan secara deduktif.

KERANGKA KONSEPTUAL

Foreign Aid dan Pembangunan Internasional

Foreign aid adalah bantuan atau donor berupa materi yang mencakup uang, barang, dan jasa; oleh negara pemberi kepada negara penerima, sehingga bersifat keputusan politik, yaitu diadakan sekaligus diatur oleh pemerintah pemberi dengan menggunakan modal-dana publik, untuk diberikan kepada pemerintah penerima (Riddell, 2007, pp. 91). Tujuan inti pemberian bantuan adalah "menyelamatkan" individu manusia di situasi darurat, berkontribusi pada pembangunan, pertumbuhan-perkembangan, atau pembasmian kemiskinan di negara-negara miskin. Semua itu tercakup secara komprehensif dalam harfiah "pembangunan" yang sejatinya merefleksikan nilai-nilai altruistik, keadilan sosial, serta solidaritas internasional; dan merupakan tujuan awal dan akhir dari kebijakan *foreign aid*. Namun, sejarah awal *foreign aid* yang muncul pada Perang Dingin diwarnai oleh "maksud" atau kepentingan ideologi negara pemberi sendiri seperti untuk memenuhi ketidakpuasan sosial yang dapat menggoda masyarakat internasional terhanyut dalam arus gejolak komunisme dan impuls teroris. Kepentingan ekonomi-komersial juga turut menjadikannya "kendaraan" seperti penebaran titik-titik bisnis/komersial sebagai langkah adaptif Jepang yang dimasukkan dalam agenda reparasinya di negara-negara terdampak atas kerusakan yang dibuatnya pada Perang Dunia II. Dengan demikian, sepanjang sejarah, kajian mengenai tujuan *foreign aid* berupa pengembangan/pembangunan sering mengalami distorsi oleh tujuan politik dan keuntungan komersial (Tarp & Hjertholm, 2000, pp, 80; Sogge, 2002, pp. 43; Browne, 2006, pp. 9; Lumsdaine, 1993, pp. 29).

Dalam disiplin Hubungan Internasional, *foreign aid* pada dasarnya merupakan salah satu alat diplomasi yang digunakan negara sebagai aktor utama untuk mencapai kepentingan nasionalnya sehingga masuk dalam narasi realis (Lancaster, 2007, p. 3). Pada puncak fungsi tertingginya, *foreign aid* juga menyiratkan penggunaan sarana/alat ekonomi dalam diplomasi ekonomi untuk tujuan politik, dicerminkan dari kebalikannya, yaitu sanksi negatif dan embargo yang dijatuhkan oleh suatu negara kepada negara lain (Baldwin, 1985; Lee & Hocking, 2010: 6; Okano-Heijmans, 2011). Meskipun solidaritas masyarakat global terhadap isu Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini semakin meningkat, kepentingan nasional ini masih secara implisit didahulukan sehingga mengusung narasi neorealis (Pugh, 2019, p. 4; Kine, 2017; Jain P., 2016b). Narasi tersebut masuk dalam konsep *foreign aid* sambil menyiratkan kepentingan ekonomi (Sato & Hirata, 2008; Hook & Zhang, 1998). Riddell (2007, pp. 96-97) juga menguatkan adanya kepentingan pelestarian atau peningkatan citra nasional dalam *foreign aid*. Dengan demikian, *foreign aid* dapat didasari oleh kepentingan politik/strategis; kepentingan ekonomi; kepedulian/solidaritas HAM atau kemanusiaan; dan peningkatan citra nasional.

Secara spesifik, Riddell (2007, pp. 91-92) menyimpulkan ada delapan kelompok motif *foreign aid* atau apa yang disebut "donor". Motif-motif tersebut adalah 1) membantu menemukan (*address*) masalah kebutuhan darurat, 2) membantu mencapai

tujuan pembangunan (perkembangan dan mengurangi kemiskinan), 3) menunjukkan solidaritas, 4) memajukan politik dan kepentingan strategis nasional baik negara pemberi maupun penerima donor, 5) membantu mempromosikan kepentingan komersial negara pemberi donor, 6) memiliki hubungan sejarah (*historical ties*), 7) memberikan serta memperkuat komoditas barang/produk publik secara global sekaligus mengurangi efek buruk dari kejahatan-kejahatan global, dan 8) mengurangi atau memberhentikan donor kepada negara-negara yang memiliki kasus buruknya HAM. Riddell (2007) menerangkan bahwa mayoritas donor dialokasikan berdasarkan campuran dari motif-motif tersebut: komposisi dalam campuran tersebut dapat berbeda tergantung pihak pemberi donor dan jalannya waktu yang masih menjadi norma *decision-making* donor.

Penelitian-penelitian terdahulu berusaha memastikan kerelatifan antara kepentingan nasional negara pemberi *foreign aid* sendiri dan kepentingan pembangunan negara penerima (Maizels & Nissanke, 1984; Alesina & Dollar, 2000; McGillivray, 2003; Berthélemy, 2004 & 2005). Riddel (2007, pp. 13) mendefinisikan pembangunan (*development*) dalam konteks *foreign aid*, sebagai dukungan untuk ekonomi; kemajuan sosial; dan pengurangan kemiskinan di negara penerima. Adapun kepentingan nasional dapat tercakup pada empat kategori kepentingan nasional menurut Nuechterlein (1976), yaitu pertahanan; ekonomi; tatanan dunia; dan ideologi. Walaupun secara eksplisit dan universal diumumkan untuk tujuan pembangunan, *foreign aid* mengimplisitkan konsensus saat ini, yaitu bahwa kepentingan nasional masih penting dalam pengalokasiannya. Keduanya bersifat esensial sehingga Riddell (2007, pp. 93) tetap memisahkannya dengan mengelompokkan faktor-faktor yang ada di dalam keduanya menjadi faktor pembangunan (*developmental*) (kepentingan pembangunan negara penerima) dan faktor nonpembangunan (*non-developmental*) (kepentingan nasional negara pemberi). Istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor pembangunan sebagai motif nonstrategis, dan faktor nonpembangunan sebagai motif strategis.

Penulis menggunakan tiga dari motif-motif *foreign aid* menurut Riddell untuk menjawab mengapa Jepang memberikan *foreign aid* dalam YAP berdasarkan motif nonstrategis. Pertama, negara memberikan *foreign aid* kepada negara yang memiliki ikatan sejarah sebelumnya. Contohnya adalah alokasi *foreign aid* negara-negara Eropa berdasarkan status negara bekas kolonial atau yang berhubungan dengan sejarah kolonial mereka (Riddell, 2007, p. 97). Kedua, negara memberikan *foreign aid* untuk mempercepat negara penerima dalam mencapai tujuan pembangunan (pertumbuhan dan infrastruktur) dan pengurangan kemiskinan. Pengalokasiannya dapat berupa peningkatan investasi seperti perluasan perdagangan dan tabungan; serta bantuan noninvestasi seperti peningkatan layanan atau infrastruktur umum dan pelunasan hutang yang tidak dapat dibayar (Riddell, 2007, pp. xvii & 7-8).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sisi Strategis *Foreign Aid* Jepang

Foreign Aid sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Jepang

Foreign aid tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang digunakan beberapa negara pemberi termasuk Jepang. Kondisi transformasi gagasan dan praktik pembangunan yang pesat menjadikan struktur *foreign aid* berubah baik dalam

karakteristik distribusi, orientasi, maupun motifnya yang disesuaikan dengan kebijakan setiap negara donor (Bachtiar, 2014). Selama hampir 50 tahun, ODA Jepang meluas secara stabil, dari donor tersedikit menjadi donor terbanyak. Selain itu, Jepang memiliki penerima ODA-nya terbanyak dengan lebih dari 170 negara penerima.

Meskipun demikian, rasio ODA Jepang yang berasal dari Pendapatan Nasional Brutonya (PNB) sering menurun dan tidak pernah lebih dari 0,7 persen. Pada tahun 2004, ODA Jepang menurun sampai 0,19 persen yang menjadi pertama kali ejak 1964, dibandingkan 0,3 persen pada 1980-an dan 0,25 persen pada 1990-an (Riddell, 2007, pp. 59). Dengan demikian, terlihat dinamika/perubahan visi atau arah kebijakan yang mendasari pemberian *foreign aid* Jepang.

Pada tahun 1975, Hasegawa Sukehiro (1975) mengidentifikasi lima objek yang memotivasi Jepang memanfaatkan *foreign aid* sebagai kebijakan luar negeri negaranya: 1) memacu proses rekonstruksi dan pertumbuhan ekonomi Jepang; 2) menjalin hubungan diplomatik antara Jepang dengan negara tetangga; 3) menjaga sistem politik, ekonomi, dan sosial, serta menstabilkan kebijakan yang bermanfaat bagi Jepang di negara penerima bantuan Jepang; 4) meningkatkan pendapatan perkapita di Jepang melalui aliran komersial kembali ke Jepang dari proyek bantuan luar negeri; dan 5) menegaskan pengaruh dan kepemimpinan Jepang baik dalam komunitas regional maupun global (Hasegawa, 1975: 11).

Pada tahun 2003, Jepang mulai memberanikan diri merevisi tujuan *foreign aid*-nya dengan menampakkan corak keamanan dan ekonominya sendiri. Tujuannya bukan untuk perkembangan atau pembasmian kemiskinan di negara-negara miskin, melainkan "untuk berkontribusi pada perdamaian dan pemangunan komunitas internasional sehingga membantu memastikan keamanan dan kemakmuran Jepang sendiri" (MOFA Japan, 2003). Kemudian, arah kebijakan ini masih dimasukkan dalam reformasi ODA *Charter* pada 2016 (MOFA Japan, 2016). ODA Jepang dibingkai lebih spesifik dengan konteks lima prioritas: 1) mendukung usaha kemandirian (*self-help*) negara berkembang, 2) mengambil perspektif keamanan manusia, 3) mengaplikasikan prinsip keadilan dengan memerhatikan masalah-masalah tertentu pada kelompok rentan; perbedaan antara kaya dan miskin; serta perbedaan regional, 4) memanfaatkan pengalaman dan keahlian Jepang; serta 5) bekerja secara kooperatif dengan komunitas internasional. Berdasarkan prioritas-prioritas tersebut, Jepang meresmikan empat kebijakan dasar untuk mengalokasikan ODA, tidak ada satupun yang mencantumkan pengentasan kemiskinan (pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi, serta pertanian); pertumbuhan berkelanjutan (infrastruktur, perdagangan dan investasi); menangani isu-isu global (lingkungan, penyakit menular, populasi, pangan, energi, bencana alam, terorisme, narkoba, serta kejahatan terorganisir); dan pembangunan perdamaian (pencegahan konflik) (Riddell, 2007, pp. 60). Dengan kata lain, Jepang memberi bantuan kepada negara berkembang dalam wadah kerja sama ekonomi dengan bingkai abstrak membangkitkan pembangunan sosial dan ekonomi negara tersebut (JICA, 2015a).

Teknis ODA Jepang

ODA Jepang diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu bantuan multilateral dan bantuan bilateral. Bantuan multilateral mencakup adanya pembiayaan serta kontribusi

finansial pada organisasi internasional seperti *United Nations*, *World Bank*, *United Nations Development Program* (UNDP), dan institusi keuangan regional seperti Asian *Development Bank* (ADB). Sedangkan bantuan bilateral diberikan kepada negara penerima secara langsung baik dalam kerja sama teknis, pinjaman, maupun hibah (MOFA Japan, 2016).

Secara teknis, terdapat tiga wujud *foreign aid* bilateral Jepang yang dikelola oleh JICA—lembaga kerja sama internasionalnya, yaitu: 1) *technical cooperation*; 2) *loan*/pinjaman; dan 3) *grant aid* (JICA, 2021a). Waktu pencairan anggaran pinjaman dibagi atas beberapa tahun fiskal yang telah ditentukan pada area kebijakan yang telah ditentukan pula pembagiannya (lihat **Gambar 2**). Pencairan anggaran tersebut dilakukan setelah evaluasi terhadap tindakan atas kebijakan tersebut dilakukan di setiap tahun fiskal. Selain itu, wujud pinjaman tersebut dapat berupa Private Sector Investment Finance (PSIF) yang difasilitasi JICA di bawah narasi tujuan pembangunan berkelanjutan, terlebih sekaligus dan lebih digaungkan lagi sejalan dengan tren tuntutan Millenium Development Goals (MDGs) kemudian SDGs (JICA, 2019c; JICA, 2017: 7; MOFA Japan, 2022). Secara umum, ketentuan pinjaman tersebut adalah suku bunga sebesar 1,4% dalam jangka waktu pembayaran/pelunasan kembali 30 tahun, termasuk masa tenggang 10 tahun (Sakamoto, 2018). Pada tahun fiskal 2015/2016, Jepang meminjamkan 185,8 Miliar Yen kepada India pada berbagai sektor dengan sektor air menjadi penerima terbesar kedua (Sakamoto, 2018). Sedangkan total pinjaman untuk YAP adalah sebesar 63,677 Juta Yen (JICA, 2021b, p. 12). Pada 2015, limbah di Sungai Yamuna telah berhasil diolah sebanyak 914 Juta Liter perhari melalui STP YAP (JICA, 2015b).

Gambar 2. Mekanisme ODA Jepang Bentuk Pinjaman

Policy Area	1st Fiscal Year	2nd Fiscal Year	3rd Fiscal Year
Policy A (Ex. Business procedure)	•Action A	•Action A'	•Action A''
Policy B (Ex. Human resource)	•Action B	•Action B'	•Action B''
Policy C (Ex. Small scale infrastructure)	•Action C	•Action C'	•Action C''

Sumber: (Sakamoto, 2018)

Salah satu karakteristik penting dari proyek-proyek JICA adalah bahwa sebagian besar dari pinjamannya berupa kredit resmi untuk pemerintah negara penerima ODA. Dengan demikian, ketika suatu negara berhutang dan tidak dapat membayar utang karena kesulitan ekonomi, penjadwalan ulang utang terkadang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan internasional di antara negara-negara pemberi kredit di Paris Club untuk memastikan pembayaran utang yang berkelanjutan. Negara debitur yang menerima dukungan sementara untuk mengatasi masalah likuiditas tersebut akan melaksanakan program restrukturisasi ekonomi yang telah disepakati dengan International Monetary Fund (IMF) untuk memperoleh kapasitas layanan utang yang berkelanjutan (JICA, 2020, p. 64).

Pada implementasinya, Jepang tidak lepas tangan dari negara penerima pinjaman begitu saja setelah memberikan pinjaman. Karena negara-negara

berkembang yang meminta pinjaman ODA untuk proyek-proyek prioritas tinggi seringkali tidak dapat melakukan perencanaan proyek tersebut, JICA mengadakan suatu penelitian untuk membantu akomodasi kekurangan dan perencanaan proyek itu, seperti program Summary of Special Assistance Facility (SAF). Summary of Special Assistance for Project Implementation (SAPI) merupakan salah satu kerangkanya yang pernah dikerjakan pada YAP tahun 2000 untuk mempelajari dan mengidentifikasi masalah penghambat pelaksanaan proyek secara efektif, serta mengusulkan langkah-langkah perbaikan untuk memecahkan masalah secara tepat waktu (JICA, 2001, p. 132). Selain itu, JICA juga melakukan evaluasi rutin pada setiap proyek ODA-nya di negara penerima (JICA, 2008, p. 62). Fungsi legislatif oleh Kementerian Luar Negeri Jepang lebih berfokus pada pendataan jumlah *foreign aid* dan promosi tujuan-tujuannya daripada pertanggungjawaban di hadapan publik mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya (Lancaster, 2007, p. 20). Sedangkan dalam fungsi eksekutif, implementasi program *foreign aid* Jepang dilakukan oleh JICA.

Kepentingan Strategis *Foreign Aid* Jepang

Data dan penelitian-penelitian sebelumnya menunjukan keberlanjutan alokasi *foreign aid* Jepang yang ditujukkan untuk mendukung persepsi kepentingan ekonomi, politik, dan keamanannya sendiri dari negara penerima yang berasal dari negara-negara berkembang atau tidak stabil (Maizels & Nissanke, 1984, pp. 891). Dengan kata lain, Jepang lebih didorong oleh motif kepentingan sendiri atau kriteria nonpembangunan, terlebih kepentingan geopolitik di kawasan Asianya. Penentuan negara penerima didasarkan lebih pada hubungan bilateral daripada hanya pada tujuan mengentaskan kemiskinan meskipun sebagai alasan formal untuk menjustifikasi pemberian *foreign aid* (Riddell, 2007, pp.96-98).

Pemerintah Jepang memulai praktik *foreign aid* pasca Perang Dunia II dalam bentuk pembayaran reparasi bagi negara yang selama perang pernah mengalami pendudukan oleh militer Jepang. Ketika bergabung dengan Colombo Plan pada tahun 1954, Jepang kemudian memenuhi kualifikasi sebagai negara donor bantuan resmi, kemudian pada periode yang sama, Jepang memberi bantuan dalam skala kecil terutama dalam bentuk bantuan teknis (Loutfi, 1973: 47). Pada tahun-tahun awalnya, ODA difokuskan di bawah agenda mendorong kemandirian promosi ekspor dan pengadaan sumber daya alam melalui proyek bantuan pinjaman kredit di negara-negara Asia (Hanabusa 1991; Yanagihara and Emig 1991; Rix 1980, 1987, 1990; Inada, 1990).

Pada akhir 1965-an, Jepang merubah target ODA-nya, yakni di samping negara-negara Asia yang tetap menjadi prioritas utama sebagai penerima ODA, Jepang memperluas jangkauan ODA-nya ke sejumlah negara di Afrika; Amerika Latin; Timur Tengah; dan Oseania yang memenuhi syarat/motif penerima ODA. Sejak itu, nilai Yen dari *foreign aid* Jepang meningkat pesat seiring dengan perluasan program/bantuan yang ditawarkan akibat penyaluran mata uang Yen ke luar negeri secara multilateral dan bilateral. Melihat keuntungan tersebut, Jepang menggencarkan implementasi *foreign aid*-nya sehingga melampaui Perancis sebagai negara donor terbesar kedua pada 1984, kemudian menyusul Amerika Serikat pada tahun fiskal 1987-1988 (Yanagihara & Emig, 1991: 37). Selama tahun 1990-2000-an, Jepang terus mempimpin

dengan kontribusi hampir 20 persen dari ODA seluruh negara donor, terlebih sebagai satu-satunya negara Asia yang bersaing dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa (Riddell, 2007, pp. 59).

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa Jepang memanfaatkan *foreign aid* untuk kepentingan ekonomi dari ikatan komersial dan investasi. Pengikatan *aid* ini merupakan salah satu dimensi komersialisasi. Kepentingan komersial terletak pada pelobian untuk mendapatkan akses terhadap dana *foreign aid* yang biasanya didasarkan pada negosiasi sama-sama menang atau kepentingan bersama. Isinya adalah mengikat *foreign aid* dengan kepentingan komersial berbasis *aid* seperti lapangan kerja dan komoditas/angka ekspor yang akan diperluas di negera pemberi. Pada saat yang sama, peningkatan pembangunan di luar negerinya juga turut dimasukkan dalam ikatan tersebut (Riddell, 2007, pp. 99).

Berbeda dengan negara-negara Eropa seperti Swedia, Belanda, Norwegia, Denmark, dan Finlandia yang menampilkan *foreign aid* mereka untuk mengartikulasikan solidaritas dan pembangunan sebagai faktor alokasinya; Jepang seperti Amerika Serikat memberi *foreign aid* secara eksplisit untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraannya sendiri: dengan perhatian akan kemiskinan menjadi prioritas terbawah (Riddell, 2007, pp. 96). Menteri Luar Negeri Jepang menyampaikan bahwa ODA Jepang diberikan akhirnya demi Jepang sendiri, yakni meninggikan profil atau citra negaranya dan masyarakatnya di dunia (MOFA Japan, 2006a). Arti ini menjawab pertanyaan mengapa *foreign aid* Jepang banyak dikonsentrasikan di Asia.

India menjadi negara pertama yang menerima *foreign aid* Jepang pada tahun 1958 sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa Jepang memilih India untuk menjadi penerima pertamanya (MOFA Japan, 2022). Motif nonstrategis *foreign aid* Jepang seperti hubungan sejarah diargumentasikan dapat membantu menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu motif pembangunan (nonstrategis), yaitu membantu mencapai tujuan negara penerima, juga menggeser arah kepentingan strategis sendiri (*self-interest*) Jepang dan memberikan momentum baginya untuk memenuhi tuntutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) saat ini.

2. Hubungan Sejarah

Sejarah Penyebaran Buddhisme oleh India di Jepang

Kemunculan Buddhisme di Jepang diawali dengan biksu India yang datang ke Jepang dan mengenalkan Buddhisme ke Jepang pada tahun 736 Masehi di Kuil Tōdai-ji Nara. Mayoritas orang-orang India yang merupakan para Buddhis membentuk identitas budaya negara India yang kemudian mempengaruhi budaya serta peradaban Jepang (MOFA Japan, 2021). Interaksi sosial-budaya di antara identitas India dan Jepang ini menimbulkan pertukaran pikiran dan saling memberi perubahan sejalan dengan migrasi kalangan biksu dan pelajar dari kedua negara tersebut sehingga kedua budaya tersebut saling mempengaruhi (Leupp, 2003; Singh, 2006). Berkat India, Jepang menjadi negara dengan Buddha di posisi kedua mayoritas agama penduduknya, yaitu sebesar 33,2% (World Population Review, 2023b). Narasi yang monumental dan historis ini terus dibanggakan oleh Jepang dengan penyampaiannya yang ditunjukkan di hampir setiap acara kunjungan antarpemerintah Jepang-India ataupun dokumen resmi lembaga pemerintah keduanya (Singh, 2006; MOFA Japan, 2021; MEA India, 2017).

Sejarah Hubungan Perdagangan/Ekonomi antara India dan Jepang

Pada Zaman Meiji (1868-1912), katun asal India berkontribusi pada pengembangan industri tekstil di Jepang dengan 10% impor dari India. Kemudian, bijih besi India yang juga mengembangkan industri baja dan memulihkan kerusakan Perang Dunia II di Jepang dengan 30% impor dari India pada 1960 (Sakamoto, 2018). Bantuan Jepang terinspirasi dari reparasi perang yang harus dibayar oleh pemerintahnya setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II. India yang menjadi salah satu dari tiga belas negara Asia memenuhi syarat untuk menerima pembayaran reparasi pada tingkat yang dinegosiasikan oleh Pemerintah Jepang. Jepang mulai melakukan reparasi pada tahun 1954 dan selesai pada 1977 (Lancaster, 2007, p. 112).

Pengaturan yang dibuat oleh Pemerintah Jepang untuk mengelola reparasi tersebut membentuk cara pemberian *foreign aid* Jepang serta tujuan yang akan diberikan oleh bantuan tersebut ke depannya. Reparasi digunakan untuk membiayai program atau proyek-proyek yang diminta oleh pemerintah negara penerima dengan awal pendekatan berbasis permintaan resmi kepada Jepang. Secara teori, pemerintah yang ingin menerima bantuan Jepang harus menentukkan proyek untuk pendanaan tersebut. Secara umum, Jepang memanfaatkan pendekatan ini untuk menguntungkannya, yaitu melalui perusahaan-perusahaan Jepang yang berkesempatan memperluas produksi dan ekspor mereka, sehingga menuai skala ekonomi di dalam negeri serta menabur pasar baru di luar negeri untuk barang dan jasa mereka. Beberapa proyek reparasi ini juga melibatkan pengembangan produksi bahan baku seperti kapas dan produk kayu, yang kemudian dapat diimpor Jepang untuk kebutuhan industrinya. Memperluas ekspor dan memperoleh akses impor yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ekonomi serta tujuan diplomatik Jepang yang lebih luas diperlukan untuk kemakmuran maupun Jepang (Lancaster, 2007, p. 112).

Pada pertengahan tahun 1950-an, reparasi ini tidak cukup untuk mencapai tujuan diplomatik dan komersial Jepang. Terlebih, Jepang berambisi membangun kembali hubungan baik dengan negara-negara di Asia dan di tempat lain yang tidak ada dalam daftar reparasi. Terlebih, sumber penting bahan mentah dan pasar ekspor potensial terdapat di negara-negara yang tidak menerima reparasi, seperti India. Dengan demikian pasca Perang Dunia II, Jepang mulai melihat aspek dan hubungan ekonomi yang akan lebih memenuhi kepentingan negara daripada militer di masa depan. Memberikan bantuan adalah elemen yang berguna dalam apa yang sering menjadi paket kebijakan untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, pada tahun 1954, Jepang bergabung dengan Colombo Plan dan memberikan sejumlah kecil bantuan teknis kepada negara-negara tertentu di Asia. Kebijakan tersebut menandai awal resmi diluncurkannya bantuan Jepang hingga menjadikannya negara ketiga donor terbesar di dunia dan terbesar pertama di Asia (Donor Tracker, 2023). Dengan cepat, Pemerintah Jepang memutuskan bahwa pinjaman Yen, bersama beberapa persyaratan, adalah sarana yang dibutuhkan untuk memperluas hubungannya di Asia dan di benua lain (Lancaster, 2007, p. 113). Negosiasi pertamanya dengan India terjadi pada tahun 1958, yaitu tentang pembayaran barang dan jasa Jepang tentang pengembangan bijih besi di Goa (Arase, 1995, pp. 39-40).

Sejarah Hubungan Perseptif (*Perceived*) Publik antara India dan Jepang

Kemunculan hubungan sosial konstruktif antara Jepang dan India berawal dari persahabatan pada 1902 antara dua tokoh berpengaruh, Okakura Tenshin dari Jepang dan Rabindranath Tagore dari India. Meskipun berbeda budaya dan pandangan politik, kedua cendikiwan ini mengusung persatuan "perjuangan Asia" (Bharucha, 2009). Lalu pada 1904, pembentukan hubungan bilateral sebagai dua negara mulai dimanifestasikan dengan didirikannya Indo-Japanese Association kemudian Indo-Japanese Trade Agreement sampai saat India menjadi jajahan Inggris yang akhirnya turut diperkuat oleh aliansi Inggris-Jepang terutama sebelum Perang Dunia I (Government of Bombay, 1920; The Japan Daily Mail, 1906). Namun, karena dorongan Amerika Serikat pada 1923, hubungan tersebut mulai rusak sehingga banyak aktivis kemerdekaan India kabur ke Jepang dan banyak pemerintah Jepang mendukung kemerdekaan India. Arus ini berhasil menggerakkan Indian National Army untuk menjalin aliansi dengan Jepang pada saat Jepang berusaha menaklukkan kolonial Inggris di Myanmar (1824-1948).

Timbal balik pun diberikan oleh India kepada Jepang. Setelah Perang Dunia II, Hakim Radhabinod Pal asal India di International Military Tribunal for the Far East di Tokyo menjadi terkenal di kalangan Jepang karena penilaiannya yang menguntungkan Jepang (Singh, 2006). Bahkan, India memberi dua ekor gajah yang dinilai sebagai harapan kepada Jepang setelah kekalahan pada Perang Dunia II (Nayar, 2007; Mathai, 1979). India juga menolak menghadiri San Francisco Peace Conference yang membatasi kedaulatan Jepang dan menolak klaim tanggung jawab Jepang dalam reparasi kerusakan Perang Dunia II (Rao, 2009; Sen, 2008; Sakamoto, 2018). Selain itu, kedua negara ini saling membela di kancah internasional, dinilai dari Jepang yang memposisikan diri sebagai salah satu negara di baris pertama yang mengakui kemerdekaan India 1948. Kemudian, undangan India kepada Jepang untuk mengikuti Asian Games 1951 di Delhi sebagai negara yang merdeka turut menandai hubungan harmonis mereka. Bahkan, Jepang mengakui asosiasinya dengan India sebagai persahabatan internasional tertuanya (MEA India, 2017). Oleh karena itu, narasi hubungan India-Jepang telah sejak lama mendapat persepsi publik yang baik secara luas dari masyarakat India maupun Jepang.

India menjadi penerima *foreign aid* bilateral Jepang terbesar dan tertua di dunia sejak keduanya meresmikan hubungan diplomatik mereka pada 1952. Hubungan ini kemudian dikembangkan menjadi pemberian pinjaman ODA Jepang pada 1958 (Sakamoto, 2018; MOFA Japan, 2021). Berbagai kunjungan antarpemerintah satu sama lain dan kerja sama kemitraan keduanya turut menandakan hubungan yang baik. Puncaknya, Japan-India Strategic and Global Partnership yang dikembangkan menjadi Japan-India Special Strategic and Global Partnership pada 2014, dengan salah satu komitmennya adalah peningkatan investasi dan pembiayaan oleh Jepang kepada India, termasuk ODA, dalam waktu 15 tahun (MOFA Japan, n.d.; Sakamoto, 2018).

3. Membantu India Mencapai Tujuan Pembangunannya

Tujuan Pembangunan YAP

Sanitasi merupakan salah satu sektor utama *foreign aid* dan norma internasional Jepang. Sejak 1970, *foreign aid* bilateral Jepang pada sektor tersier, seperti rumah sakit; lembaga penelitian dan pendidikan; serta khususnya, sanitasi

terus ditingkatkan hingga setengah dari alokasi sektor sosial (OECD, 1999, pp. 17-18; OECD, 2004a). Menurut DAC Peer Review 2004, peningkatan tersebut ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan akses kesehatan; pendidikan; air; dan sanitasi (OECD, 2004b, p. 26). Pengembangan pada sektor air dan sanitasi menjadi fokus kedua setelah infrastruktur ekonomi dan mendapatkan alokasi *foreign aid* terbesar keempat, yaitu sebesar 6,2% dari total *foreign aid* tersebut (lihat **Gambar 3**) (OECD, 2020; Donor Tracker, 2022).

Gambar 3. Alokasi ODA Bilateral Jepang Tahun 2019 Berdasarkan Sektor

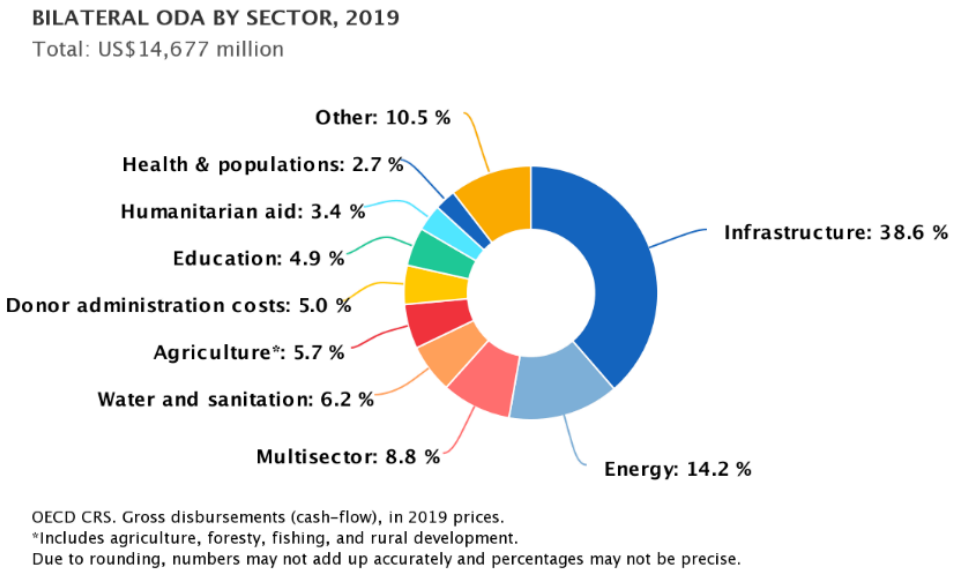

Sumber: (Donor Tracker, 2022)

Capaian YAP menekankan agenda pembangunan di India dengan prioritas pada pembangunan perkotaan. Di dalam prioritas tersebut, pasokan air dan saluran limbah ditingkatkan sehingga mengusung pembangunan yang berkonsep urbanisasi; perindustrian; serta pertumbuhaan area pedesaan yang inklusif (JICA, 2019c). Kebijakan yang mendasari proyek YAP didesain untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, penguatan industri yang kompetitif, serta membangkitkan hubungan kerja sama regional. Demikian juga visi dan misi JICA yang sesuai dengan pembangunan yang dikuatkan lagi dengan adanya tuntutan internasional yang sejalan, yakni SDGs poin pembangunan yang dinamis dan inklusif. Adapun misinya adalah melaksanakan agenda secara global, mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan yang adil, meningkatkan *governance*, dan mencapai *human security* (JICA, 2019c). Misi ini menjadi paradigma Jepang memilih India sebagai negara dengan keperluan mencari titik temu akar esensial pembangunan serta turunannya, yaitu masalah sanitasi dan air bersih. Ditentukannya masalah pembangunan yang dianggap Jepang berawal dari sanitasi ini mencakup perhatian pada indikator turunan pembangunan, yaitu tingginya angka putus sekola dan kelaparan serta kurangnya air bersih dan akses kesehatan untuk terbebas dari penyakit berbahaya seperti malaria (JICA, 2019c).

Sejalan dengan ekonomi India yang sebagian dikontribusikannya, JICA telah membuka hubungan perusahaan maupun tempat tinggal bagi warga Jepang di India yang meningkat setiap tahunnya (JETRO, 2017; MOFA Japan, 2017). Peningkatan di bidang manufaktur yang kompetitif, dan bidang lapangan pekerjaannya juga dihasilkan sejalan dengan pembukaan kesempatan akomodasi pelatihan dan kesukarelawanan oleh Jepang. Hal ini membantu mencapai kebijakan "Make in India" Pemerintah India yang mendorong perusahaan menghasilkan produk India dan investasi serta lapangan pekerjaan sekaligus mempromosikan pembangunan keahlian dan sumber daya manusia (JICA, 2019d).

Nilai Budaya atau Norma Sanitasi Jepang

Pandangan yang dianut suatu negara secara luas berdasarkan budaya; agama; dan ideologinya, melihat apa yang benar dan salah maupun pantas dan tidak pantas dalam kehidupan publik serta pribadi. Dengan pandangan tersebut, negara berpendapat bahwa semua manusia memiliki hak atas kebebasan maupun kehidupan minimum, atau bahwa individu harus mandiri dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan mereka sendiri (Lancaster, 2007, p. 18). Pemerintah Jepang peduli dengan HAM pada bidang sanitasi yang bersih dan higienis, ditunjukkan dari nilai dan norma dalam standar kebersihan dengan tingginya infrastruktur sanitasi Jepang sebagai *norm entrepreneur* (Nurhidayatika, 2020; Sunstein, 1996). Menurut laporan *UN Special Rapporteur on the HRWS*, Jepang menekankan akses sanitasi khususnya air dan kamar mandi untuk dimasukkan dalam HAM dengan prinsip nondiskriminasi terhadap seluruh lapisan masyarakat (OHCHR, 2010).

Jepang merupakan salah satu negara terbersih di dunia di antara 20 negara Eropa dan terbersih pertama di Asia (World Population Review, 2023a). Jepang memiliki pandangan khusus terhadap sanitasi dengan pemerintahnya yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan melalui sistem sanitasi yang baik (JSC, n.d.). Sejak Era Meiji, muncul keprihatinan di kalangan pemerintah akan tercemarnya air akibat buruknya pengelolaan limbah detergen dan kotoran manusia. Pada pasca era modernisasi, kesadaran tersebut pun muncul dengan usaha dalam pencegahan penyakit akibat hujan dan banjir; revisi Undang-Undang Pembuangan Limbah 1958; penggantian pupuk dari semula kotoran manusia menjadi bahan kimia; pengawasan oleh berbagai lembaga pemerintah, pembangunan fasilitas pengolahan lumpur; serta penggunaan kloset *flush* yang menunjukkan perkembangan sistem pembuangan limbah (Bank, 2016). Kini, sistem pembuangan limbah telah mencakup 80% rumah tangga di Jepang (Nurhidayatika, 2020, p. 24). Selain itu, mereka juga menetapkan kerangka hukum *Johkasou* (1983) yang bersifat wajib bagi setiap warga Jepang (ITB, 2018). Hukum tersebut mengatur standar, proses, manufaktur, instalasi, dan pengelolaan sistem sanitasi (JECES, n.d.).

Masyarakat Jepang diajarkan menjaga kebersihan atau higienis sejak dini di sekolah (Rhae, n.d.). Kamar mandi dibuat sebersih dan senyaman mungkin selaras dengan budaya Mandi Cuci Kakus (MCK) yang berhubungan dengan etika dan norma yang memisahkan bersih dari najis (Harianti, 2013). Tak sedikit kamar mandi di Jepang yang dilengkapi perlengkapan "berlebih" karena orang Jepang gemar berlama-lama bahkan membaca buku dan bermeditasi di dalamnya. Selain itu, terdapat kebiasaan memisahkan bagian rumah berdasarkan kategori area bersih dan

area tidak bersih seperti kloset yang dipisahkan dari kamar mandi, serta kebiasaan menggunakan sandal khusus di dalam kamar mandi yang disiapkan di depan pintu kamar mandi (Harianti, 2013; Japan-Guide, n.d.).

Sistem atau Fasilitas Sanitasi Jepang

Kemajuan teknologi Jepang dalam sistem sanitasi membuatnya memiliki modal dalam universal dalam penyediaan air dan sanitasi. Bahkan, Jepang merupakan negara dengan tingkat kerugian distribusi air terendah di dunia karena standar yang ketat terhadap pemanfaatan air (IWA, 2018). Sistem nasionalnya yang efektif dalam utilitas air dan sanitasi adalah gabungan antara canggih dan tepatnya teknologi yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa di samping baiknya budaya atau norma sanitasi yang mewadahinya, Jepang mengembangkan standar kebersihan dengan tingginya infrastruktur sanitasi Jepang, salah satunya sebagai *norm entrepreneur* (Nurhidayatika, 2020; Sunstein, 1996).

Dalam proyek-proyek ODA di India, Jepang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi maju mereka (JICA, 2017, p. 3). Contohnya adalah pengenalan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), Geographic Information System (GIS), dan pengolahan air limbah tingkat lanjut (JICA, 2019a). Dalam berbagai agenda seperti hari perayaan tertentu, JICA mewadahi berbagai program *workshop*; On the Job Training (OJT); *capacity building*, dan pelatihan seperti Advanced Mould Development and Training Program di Central Institute of Plastic Engineering & Technology (CIPET), serta Lucknow di bawah YAP (JICA, 2019d; JICA, 2014; JICA, 2021c). Selain itu, JICA mendatangkan sukarelawan dari Jepang di bawah program Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCVs) dan Senior Volunteer (SV) untuk mempromosikan kerja sama internasional dan membagikan pengetahuan mereka kepada masyarakat India maupun global (JICA, 2019d; JICA, 2019e: 24).

Inisiatif Jepang Membagikan Nilai Budaya dan Sistem Sanitasi

Pengetahuan Jepang dalam kecanggihan sistem atau infrastruktur sanitasinya juga menjadi pendorong bagi Jepang untuk “menjual” norma kebersihan ke taraf internasional. Salah satunya dengan memimpin resolusi *International Year of Sanitation* 2008 di United Nation General Assembly (UNGA) 2007, yang mencetuskan isu *Human Right to Water and Sanitation* (HRWS) di bawah hukum internasional dan membentuk Japan Sanitation Consortium (JSC) (UN, n.d.; JSC, n.d.). Selain itu, Jepang melalui JICA telah memperkuat hubungan dengan lembaga *aid* lainnya, khususnya pada konferensi internasional World Water Forum di Kyoto pada 2003. Pada kesempatan tersebut, JICA menekankan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya melalui penelitian pembangunan di bidang air. Pada World Water Forum 2006 pula, Jepang mengusung program Water and Sanitation Broad Partnership Initiaitve (WASABI) sebagai fokus internasional tersendiri dalam mengatasi masalah air dan sanitasi (MOFA Japan, 2006b). Selanjutnya, pada 2018, Jepang menjadi tuan rumah International Water Association (IWA) World Water Congress & Exhibition (IWA, 2018).

Pandangan luas berdasarkan budaya sanitasi Jepang yang telah dijelaskan memunculkan "keyakinan berprinsip," atau norma "harapan kolektif tentang perilaku

yang tepat untuk identitas tertentu" (Goldstein & Keohane, 1993; Katzenstein & J, 1996, p. 54). Contoh keyakinan berprinsip adalah kepercayaan bahwa negara harus memberi bantuan kepada negara miskin (*least developed country*) dan negara berkembang (*developing country*). Persepsi ini diterapkan oleh Jepang sebagai negara maju (*developed country*) sekaligus negara terbersih kepada negara India sebagai negara berkembang dan negara terkotor. Sama halnya dengan kepercayaan bahwa negara bernorma sanitasi yang baik harus memberi bantuan kepada negara bernorma sanitasi yang buruk. Akar masalah sanitasi terletak pada India yang menjadi negara dengan permasalahan banyaknya masyarakat miskin dan cepatnya pertumbuhan penduduk yang berkontribusi pada sejarah panjang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Riddell, 2007, p. 54 & 104).

KESIMPULAN

Secara umum, *foreign aid* Jepang diberikan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan kemanaan nasionalnya sendiri sehingga tetap menunjukkan motif strategis *foreign aid*. Namun, dalam salah satu programnya, yaitu Yamuna Action Plan (YAP), terdapat corak-corak motif nonstrategis. Sebagai negara yang memiliki sejarah hubungan bilateral baik dengan India, Jepang memberikan *foreign aid* untuk menangani masalah sanitasi sungai Yamuna. Hubungan yang baik tersebut sejalan dengan motif *foreign aid* yang diungkapkan oleh Riddell (2007), yang mana diidentifikasi memiliki alasan hubungan baik secara historis. Selain itu, hampir seluruh mayoritas narasi YAP berisi tujuan pembangunan menunjukkan agenda pembangunan di India sehingga selaras dengan motif membantu negara lain mencapai pembangunan, yang dikemukakan oleh Riddell (2007). Kedua motif itu dijabarkan dan menemukan bahwa YAP disalurkan oleh Jepang karena aspek 1) sejarah penyebaran Buddhisme yang dibawa pertama kali oleh India di Jepang, sejarah perdagangan/ekonomi India-Jepang, sejarah hubungan perseptif India-Jepang; dan aspek 2) tujuan eksplisit pembangunan di India, nilai budaya/norma serta sistem sanitasi Jepang yang digerakkan dengan inisiatifnya dalam membagikan nilai budaya dan sistem sanitasi tersebut. Dengan kata lain, motif *foreign aid* tidak selalu bersifat strategis seperti politik, ekonomi, ataupun keamanan.

Dengan kekurangan pada cakupan terhadap motif-motif *foreign aid* secara holistik, yaitu pada motif strategis, peneliti menyarankan suatu penelitian pada motif strategis. Tidak hanya untuk mengonfirmasi kasus motif strategis, tetapi penelitian tersebut juga dapat menjawab apakah motif strategis atau motif nonstrategis yang lebih diutamakan, spesifiknya pada YAP. Selain itu, akan menjadi lebih akurat jika penelitian selanjutnya dilakukan dengan metode kuantitatif yang mampu menguji efektivitas keduanya secara eksak. Dengan demikian, kesimpulan untuk tendensi apakah suatu negara memberikan bantuan internasional bertujuan altruistik-egaliter atau beragendakan kepentingan negara sendirinya dapat terungkap.

DAFTAR PUSTAKA

Agarwal, P. (2021a, November 28). *Ensuring proper flow key to revive Yamuna: Experts*. Retrieved from The Times of India: https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/ensuring-proper-flow-key-to-revive-yamuna-experts/articleshow/87955472.cms

Agarwal, P. (2021b, November 19). *Clean Yamuna: Not lacking for effort, Delhi has spent over Rs 1,500 crore, but cleanup battle is far from won*. Retrieved from The Times of India: https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/not-lacking-for-effort-delhi-has-spent-over-rs-1500cr-but-cleanup-battle-is-far-from-won/articleshow/87788098.cms

Aijaz, R. (2020, June). *Water Supply in Delhi: Five Key Issues*. Retrieved from Observer Research Foundation: https://www.orfonline.org/research/water-supply-in-delhi-five-key-issues-67477/#_edn35

Alesina, A., & Dollar D. (2000). Who Gives Foreign Aid to Whom and Why?. *Journal of Economic Growth*, 5, 33-63, doi: 10.1023/A:1009874203400

Arase, D. (1995). *Buying Power: The Political Economy of Japan's Foreign Aid*. Boulder: Lynne Rienner.

Babu, S. V., & Seth, B. L. (2007). *Sewage Canal: How to Clean the Yamuna*. New Delhi: Centre for Science & Environment.

Bachtiar, F. R. (2014). Perubahan Identitas Australia dan Implikasinya terhadap Transformasi Kebijakan Official Development Assistance (ODA) di Asia Tenggara. Tesis Universitas Gadjah Mada, 1.

Baldwin, D. A. (1985). *Economic Statecraft*. Princeton: Princeton University Press.

Bank, A. D. (2016). *Sanitation and Sustainable Development in Japan*. Manila: Metro.

Berthélemy, J. C. (2004). *Bilateralism and Multilateralism in Official Development Assistance Policies*. University of Paris 1.TEAM Working Paper no. 04014. Paris: University of Paris 1.TEAM.

Berthélemy, J. C. (2005). *Bilateral Donors' Interest vs Recipient's Development Motives in Aid Allocation: Do All Donors Behave the Same?*. University of Paris 1.TEAM Working Paper No. 05001. Paris: University of Paris 1.TEAM.

Bharucha, R. (2009). *Another Asia Rabindranath Tagore & Okakura Tenshin*. New Delhi: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780195682854.001.0001

Cahya, I. Y. (2017). SSEAYP (SHIP FOR SOUTH EAST ASIAN YOUTH PROGRAM) dalam Perspektif Politik Luar Negeri Jepang. *Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 40.

CWC. (2017). *Water Quality Year Book: Yamuna Basin 2016-2017*. Retrieved from Central Water Commission: http://cwc.gov.in/sites/default/files/admin/2_YBO_Delhi%20_Yamuna_WQYB_2016-17.pdf

Delhi Metro. (2020, June). *REVISED ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT FOR PHASE IV PRIORITY CORRIDORS OF DELHI METRO*. Retrieved from Delhi Metro Rail Corporation Ltd:

https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/id/asia/south/india/c8h0vm0000f88o6o-att/c8h0vm0000f88o9f.pdf

Donor Tracker. (2022, April 8). *Country Japan*. Retrieved from Donor Tracker: https://donortracker.org/country/japan

Donor Tracker. (2023, December 24). *Donor Profile Country Japan*. Retrieved from Donor Tracker: https://donortracker.org/donor_profiles/japan

Government of Bombay. (1920). *Source Material for a History of the Freedom Movement in India Vol. II: 1885-1920*. Retrieved from Indian Culture: https://www.indianculture.gov.in/ebooks/source-material-history-freedom-movement-india-vol-ii-1885-1920

Halder, R. (2019, April 12). *"Close polluting units along Yamuna, orders CPCB," The Times of India*. Retrieved from The Times of India: https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/close-polluting-units-along-yamuna-orders-cpcb/articleshow/68840464.cms

Hanabusa, M. 1991. "A Japanese Perspective on Aid and Development", in Islam, Shafiqul (ed.), Yen for Development: Japanese Foreign Aid and the Politics of Burden-Sharing, New York, Council on Foreign Relations Press.

Harianti, P. (2013). *All About Japan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Hasegawa, S. (1975). Japanese Foreign Aid: Policy and Practice, New York: Praeger.

Hook, S., & Zhang, G. (1998). Japan's Aid Policy Since the Cold War: Rhetoric and Reality. *Asian Survey, 38*(11), 1051-1066.

Inada, J. (1990). *Japan's Aid Diplomacy: Economic, Political, or Strategic?*, in Newland, Kathleen (ed.,), The International Relations of Japan, London: MacMillan.

Indiatvnews.com. (2022, February 21). *Yamuna Action Plan Phase 3: Covid lockdown, air pollution-induced curbs delayed work, says DJB*. Retrieved from Indiatvnews.com: https://www.indiatvnews.com/news/india/yamuna-action-plan-phase-3-covid-lockdown-air-pollution-induced-curbs-delay-in-nod-slow-down-work-delhi-jal-board-2022-02-21-760824

ITB. (2018, Maret 15). *Pengolahan Air Limbah Dengan Sistem Johkasou*. Retrieved from ITB: https://jatinangor.itb.ac.id/2018/03/15/pengolahan-limbah-air-dengan-sistsem-johkassou/

IWA. (2018). *Tokyo Resilience and Sustainability from Science to Practice and Politicy*. Retrieved from World Water Congress: https://worldwatercongress.org/2018-tokyo/

Jain, P. (2016b). Japan's Foreign Aid: Old and New Contests. *The Pacific Review, 29*(1), 93-113. doi:10.1080/09512748.2015.1066415

Jain, S. (2016a, November 15). *Yamuna stagnant despite third Action Plan*. Retrieved from The pioneer: https://www.dailypioneer.com/2016/columnists/yamuna-stagnant-despite-third-action-plan.html

JECES. (n.d.). *Wastewater Treatment with Johkasou System*. Retrieved from JECES: https://www.jeces.or.jp/en/technology/index.html

JETRO. (2017). *Daftar Perusahaan Jepang yang Berekspansi ke India*. Retrieved from JETRO: http://www.in.emb-japan.go.jp/Japanese/2017_co_list_jp.pdf

JICA. (2001). *Statistics*. Retrieved from JICA: https://www.jica.go.jp/english/publications/jbic_archive/annual/2001/pdf/sta.pdf

JICA. (2004). *JICA Annual Report 2003*. Retrieved from Japan International Cooperation Agency (JICA): https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2003/pdf/200320.pdf

JICA. (2008, February). *Evaluation Handbook for ODA Loan Projects*. Retrieved from JICA: https://www.jica.go.jp/english/our_work/evaluation/tech_and_grant/guides/pdf/evaluationtext.pdf

JICA. (2014, December). *Newsletter from JICA INDIA OFFICE: October-December, Issue 27*. Retrieved from JICA: https://www.jica.go.jp/india/english/office/others/c8h0vm000001l2ap-att/issue27.pdf

JICA. (2015a, Desember 23). *JICA reinforces its support to continuous development of Delhi Metro and improved water and sanitation facilities in Delhi*. Retrieved from Japan International Cooperation Agency (JICA): https://www.jica.go.jp/india/english/office/topics/press151223.html

JICA. (2015b, December). *Newsletter from JICA INDIA OFFICE: October-December, Issue 31*. Retrieved from JICA: https://www.jica.go.jp/india/english/office/others/c8h0vm000001l2ap-att/issue31.pdf

JICA. (2017, February). *JICA Operations and Activities in INDIA 2016*. Retrieved from JICA: JICA. https://www.jica.go.jp/india/english/office/others/c8h0vm00004cesxi-att/brochure_10.pdf

JICA. (2019a, April 16). *The role of JICA in India's Economic Developments*. Retrieved from JICA: https://www.jica.go.jp/india/english/office/others/c8h0vm00009ylo4c-att/presentations_24.pdf

JICA. (2019b, July 8). *Clean Yamuna Project Gets a Boost through Inauguration of a New Sewage Treatment Plant in Delhi*. Retrieved from Japan International Cooperation Agency (JICA): https://www.jica.go.jp/india/english/office/topics/press190708.html

JICA. (2019c, November 20). *World Heritage Week: Promoting Tourism to Rich Heritage in India*. Retrieved from Japan International Cooperation Agency (JICA): https://www.jica.go.jp/india/english/office/topics/press191120.html

JICA. (2019d, September). *Newsletter: July-September 2019, issue 46*. Retrieved from JICA: https://www.jica.go.jp/india/english/office/others/c8h0vm000001l2ap-att/issue46.pdf

JICA. (2019e, April). *JICA Operations and Activities in INDIA 2018*. Retrieved from JICA: https://www.jica.go.jp/india/english/office/others/c8h0vm00004cesxi-att/brochure_15.pdf

JICA. (2020, November). *Annual Report JICA Data Book*. Retrieved from JICA: https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2020/c8h0vm000fc7q2b-att/2020_data_all.pdf

JICA. (2021a, January). *PROJECTS IN INDIA 2020*. Retrieved from Japan International Cooperation Agency (JICA): https://www.jica.go.jp/india/english/office/others/c8h0vm00004cesxi-att/brochure_21.pdf

JICA. (2021b). *JICA Assisted Water Supply & Sanitation Projects*. Retrieved from JICA: https://www.jica.go.jp/india/english/office/others/c8h0vm00004cesxi-att/brochure_22.pdf

JICA. (2021c, January). *JICA Operations and Activities in INDIA 2020*. Retrieved from JICA: https://www.jica.go.jp/india/english/office/others/c8h0vm00004cesxi-att/brochure_20.pdf

JSC. (n.d.). *History of Sanitation in Japan*. Retrieved from JSC: http://jsanic.org/inasia/japanhistoryx.html

Kine, P. (2017, October 27). *Japan's Abe Should Denounce Philippines' Murderous 'Drug War'*. Retrieved from Human Right Watch (HRW): https://www.hrw.org/news/2017/10/27/japans-abe-should-denounce-philippines-murderous-drug-war

Kumar, B., Singh, U. K., & Ojha, S. N. (2018). Evaluation of geochemical data of Yamuna River using WQI and multivariate statistical analyses: a case study. *International Journal of River Basin Management, 17*(2), 143–155. doi:10.1080/15715124.2018.1437743

Lachandani, N., & Nandi, J. (2017, February 22). *Here's why Yamuna is dead: No improvement in water quality*. Retrieved from The Times of India: https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/heres-why-yamuna-is-dead-no-improvement-in-water-quality/articleshow/57280223.cms

Lancaster, C. (2007). *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*. Chicago: University of Chicago Press.

Lavania, D. (2018, February 18). *61 drains directly discharge sewage into Yamuna*. Retrieved from The Times of India: https://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/61-drains-directly-discharge-sewage-into-yamuna/articleshow/62964041.cms

Lee, D. & Hocking, B. (2010). *Economic Diplomacy*. In Denemark, R. A. (ed.). The International Studies Encyclopedia. Vol. II. pp. 1216-1217. Blackwell: Wiley.

Leheny, D. R., & Warren, K. B. (2010). *Japanese aid and the construction of global development: Inescapable solutions*. London: Routledge.

Leupp, G. P. (2003). *Interracial Intimacy in Japan*. London: Continuum International Publishing Group.

Loutfi, M. F. (1973). *The Net Cost of Japanese Foreign Aid*. New York: Praeger.

Lumsdaine, D. H. (1993). *Moral Vision in International Politics: The Foreign Aid Regime 1949-1989*. Princeton: Princeton University Press.

MapsofIndia. (2021, June 15). *Top 10 Indian States and UTs with Highest Population Density*. Retrieved from MapsofIndia: https://www.mapsofindia.com/top-ten/india-states/population-density.html

McGillivray, M. (2003). Aid Effectiveness and Selectivity: Integrating Multiple Objectives into Aid Allocations', *DAC Journal*, 4(33), 23–36

MEA India. (2017, November 14). *India - Japan Relations*. Retrieved from MEA India: https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/14_Japan_Nov_2017.pdf

Misra, A. K. (2010). A river about to die: Yamuna. *Journal of Water Resource and Protection, 2*(5), 489–500. doi:10.4236/jwarp.2010.25056

Misra, M. (2015, November 30). *Why is river Yamuna still maily?: Officials do not understand the gray waters produced by the city*. Retrieved from DownToEarth: https://www.downtoearth.org.in/blog/why-is-river-yamuna-still-maily-48884

MOFA Japan. (2003). *Japan's Official Development Assistance Charter*. Retrieved from MOFA Japan: http://www.mofa.–go.jp/policy/oda/reform/revision0308.pdf

MOFA Japan. (2006a). Speech by Mr. Taro Aso at Japan National Press Club, 19 January 2006. Retrieved from MOFA Japan: http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0601–2.html

MOFA Japan. (2006b, March). *Outline of "Water and Sanitation for Broad Partnership Initiative (WASABI)"*. Retrieved from MOFA Japan: https://www.mofa.go.jp/policy/oda/category/water/wasabi0603.html#:~:text=The%20Initiative%20is%20a%20sector,World%20Water%20Forum%20in%20Mexico

MOFA Japan. (2022). *History of ODA*. Retrieved from MOFA Japan: https://www.mofa.go.jp/policy/oda/page22_001434.html

MOFA Japan. (2016). *ODA Reform*. Retrieved from MOFA Japan: http://www.mofa.go.jp/policy/oda/policy.html

MOFA Japan. (2017). *Annual Report of Statistics on Japanese Nationals Overseas*. Retrieved from MOFA Japan: https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000368753.pdf

MOFA Japan. (2021, November 18). *Japan-India Relations (Basic Data)*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs (MOFA) of Japan: https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/data.html

MOFA Japan. (n.d.). *Japan-India Partnership in a New Asian Era: Strategic Orientation of Japan-India Global Partnership*. Retrieved from MOFA Japan: https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/partner0504.html#:~:text=Japan%20and%20India%20share%20a,partnership%20between%20the%20two%20countries

Mohan, V. (2015, Desember 27). *Government plans to prioritise projects for conservation of water resources*. Retrieved from The Economic Times: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/government

-plans-to-prioritise-projects-for-conservation-of-water-resources/articleshow/50340357.cms

Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*, 2, (3), 246-266. Cambrigde: Cambridge University Press. Diambil dari https://www.jstor.org/stable/20096778

Nurhidayatika, A. S. (2020). *Kebijakan Luar Negeri Jepang dalam Upaya Konstruksi Program Sanitasi Internasional*. Retrieved from Repository UMY: http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31191

OECD. (2004b). *DAC, Peer Review: Japan (2004)*. OECD, DAC. OECD. Retrieved from http://www.oecd.org/dataoecd/43/63/32285814.pdf

OECD. (2020). *The 2020 OECD-DAC Peer Review*. Retrieved from Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b8cf3944-en/index.html?itemId=/content/component/b8cf3944-en#back-endnotea1z83

OHCHR. (2010, July 28). *Press Statement, United Nations Independent Expert on the issue of human rights obligations related to access to safe drinking water and sanitation Ms. Catarina de Albuquerque - Mission to Japan*. Retrieved from OHCHR: https://www.ohchr.org/en/statements/2010/07/press-statement-united-nations-independent-expert-issue-human-rights-obligations

Okano-Heijmans, M. (2013). *Economic Diplomacy: Japan and the Balance of National Interest*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Patel, P. P., Mondal, M., & Gosh, K. G. (2020, November 20). Some Respite for India's Dirtiest River? Examining the Yamuna's Water Quality at Delhi During the COVID-19 Lockdown Period. *Science of The Total Environment, 744*(1), 1-16. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.140851

Press Trust India. (2013, November 9). *Phase III of Yamuna Action Plan approved for Delhi. Business Standard*. Retrieved from Press Trust India: https://www.business-standard.com/article/pti-stories/phase-iii-of-yamuna-action-plan-approved-for-delhi-113120900776_1.html

Pugh, T. S. (2019). *Giving to Get: A Neorealist Explanation of Japan's Foreign Aid Program*. Retrieved from CMC Senior Theses: https://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/2259

Rao, P. V. (2009, May 30). *Nehru and Non-alignment*. Retrieved from Mainstream: http://www.mainstreamweekly.net/article1399.html

Rhae, D. (n.d.). *Hygiene Practices in Japan*. Retrieved from Tokyo Creative: https://www.tokyocreative.com/articles/19435-hygiene-practices-in-japan

Riddell, R. C. (2007). *Does Foreign Aid Really work?* Oxford: Oxford University Press.

Rix, Alan. 1980. *Japan's Economic Aid: Policy-making and Politics*. London: Croom Helm.

Rix, A. (1987). *Japan's Aid Programs: Quantity vs Quality*. Canberra: Australian Government Publishing Service.

Rix, A. (1990). *Japan's Aid Programs: A New Agenda*. Canberra: Australian Government Publishing Service.

Sakamoto, T. (2018, April 13). *Japan-India Frienship: Activities of JICA in India*. Retrieved from JICA: https://www.jica.go.jp/india/english/office/others/c8h0vm00009yl04c-att/presentations_20.pdf

Sanyal, A. (2015, January 13). *Littering in Yamuna? Pay a Fine of ₹ 5000*. Retrieved from NDTV: https://www.ndtv.com/india-news/littering-in-yamuna-pay-a-fine-of-rs-5000-726582

Sato, Y., & Hirata, K. (2008). Introduction: Constructivism, Rationalism, and the Study of Norms in Japanese Foreign Policy. In Y. Sato, & K. Hirata, *Norms, Interests, and Power in Japanese Foreign Policy* (pp. 111-127). New York: Palgrave Macmillan.

Sen, R. (2008, February 15). *Ambassador Ronen Sen's remarks at a luncheon meeting of the Japan Society in New York*. Retrieved from Embassy of India in Washington DC: https://web.archive.org/web/20080907214250/http://indianembassy.org/newsite/press_release/2008/Feb/7.asp

Sharma, M. P., Singal, S. K., & Pata, S. (2009). Water Quality Profile of Yamuna River, India. *Hydro Nepal Journal of Water Energy and Environment, 3*(3), 19-24. doi:10.3126/hn.v3i0.1914

Shukla, M. K. (2021, May 14). Species Diversity of Fishes in Relation to Physicochemical Status of the Yamuna at Kalpi. *World Journal of Advanced Research and Reviews, 10*(2), 206-213. doi:10.30574/wjarr.2021.10.2.0217

Shukla, R. R. (2020, May 25). *How River Yamuna Cleaned Itself In 60 Days Of Coronavirus Lockdown*. Retrieved from NDTV: https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-lockdown-yamuna-cleanest-in-30-years-as-industrial-dumping-halts-2234790

Singh, M. (2006, December 14). *PM's address to Joint Session of the DIET*. Retrieved from ormer Prime Minister of India: https://archivepmo.nic.in/drmanmohansingh/content_print.php?nodeid=486&nodetype=2

Statistics Times. (2020, May 13). *List of Indian states by population*. Retrieved from Statistic Times: https://statisticstimes.com/demographics/india/indian-states-population.php

Sunstein, C. R. (1996). Social Norms and Social Roles. *Columbia Law Review, 96*(4), 903-968. doi:10.2307/1123430

Tarp, F. & Hjertholm, P. (2000). *Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for the Future*. London: Routledge.

TCD. (2020). *River Yamuna: Deteriorating Water Voices from the Ground*. Chicago: Tata Centre for Development (TCD) at University of Chicago.

The Economic Times. (2016, Agustus 9). *No action on NGT plan for Yamuna*. Retrieved from The Economic Times: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/no-action-on-ngt-plan-for-yamuna/articleshow/53612634.cms

The Japan Daily Mail. (1906). *The Japan Daily Mail Volume 45*. Retrieved from Google Books: https://books.google.co.id/books/about/The_Japan_Daily_Mail.html?id=-1IxAQAAMAAJ&redir_esc=y

UN. (n.d.). *International Decade for Action 'WATER FOR LIFE' 2005-2015*. Retrieved from UN: https://www.un.org/waterforlifedecade/

UNICEF. (n.d.). *Strengthening sustainable WASH programming: India*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/india/what-we-do/water-sanitation-hygiene#:~:text=a%20major%20concern.-,India%20has%20made%20rapid%20progress%20in%20ending%20open%20defecation%20across,by%20all%2C%20at%20all%20times

Upadhyay, R., Dasgupta, N., Hasan, A., & Upadhyay, S. K. (2011). Managing water quality of River Yamuna in NCR Delhi. *Physics and Chemistry of the Earth, 36*(9-11), 372–378. doi:10.1016/j.pce.2010.03.018

WaterAid. (2018). *The Water Gap: State of Water Report*. Retrieved from WaterAid: https://washmatters.wateraid.org/publications/the-water-gap-state-of-the-worlds-water

World Population Review. (2023a). Cleanest Countries in the World 2023. Retrieved from World Population Review: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/cleanest-countries-in-the-world

World Population Review. (2023b). *Buddhist Countriest 2023*. Retrieved from World Population Review: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/buddhist-countries

Yadav, A., & Khandegar, V. (2019). Dataset on assessment of River Yamuna, Delhi, India using indexing approach. *Data in Brief, 22*, 1–10. doi: https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.11.130

Yanagihara, T., & Emig, A. (1991). *An Overview of Japan's Foreign Aid*, in Islam, Shafiqul (ed.), Yen for Development: Japanese Foreign Aid and the Politics of Burden-Sharing, New York: Council on Foreign Relations Press.